

RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ----- 1

1.1. Latar Belakang ----- 1

1.2. Dasar Hukum ----- 4

1.3. Maksud dan Tujuan ----- 6

1.3.1. Maksud ----- 6

1.3.2. Tujuan ----- 7

1.4. Sistematika Penulisan ----- 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU----- 9

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan

Tahun N-2 / 2020 ----- 9

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan----- 9

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak

Memenuhi Target ----- 15

2.1.3. Keberhasilan Realisasi Program dan Kegiatan----- 16

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Terpenuhi

Atau Melebihi Target Kinerja----- 17

2.1.5. Implikasi Capaian Program dan Kegiatan ----- 18

2.1.6. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Dalam

Mengatasi Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja ----- 19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah ----- 20

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) ----- 20

2.2.2. Keberhasilan Program dan Kegiatan----- 24

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Bapenda ----- 27

2.3.1. Hambatan ----- 30

2.3.2. Tantangan dan Peluang ----- 32

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal ----- 34

2.4.1. Perbandingan Rancangan Awal Dengan Analisis Kebutuhan-- 34

2.4.2. Analisis Kebutuhan ----- 35

2.4.3. Catatan Rumusan Kebutuhan ----- 36

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----- 45

2.5.1. Proses Usulan Program dan Kegiatan ----- 45



RENJA BAPENDA

2.5.2. Kesesuaian Usulan Dengan Isu-Isu Penting dan Tupoksi -----	45
Bab III TUJUAN, SASARAN PADA RENJA BAPENDA -----	47
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional -----	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Kota Bekasi -----	47
3.2.1. Tujuan -----	51
3.2.2. Sasaran -----	51
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas -----	52
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA	
KOTA BEKASI -----	59
4.1. Belanja Langsung -----	59
4.2. Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif -----	70
Bab V PENUTUP -----	73



Tahun
Anggaran | 2022

RENJA BAPENDA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda Kota Bekasi) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bekasi adalah lembaga dalam kategori urusan penunjang pemerintahan umum yakni dalam hal urusan pengelola keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (tentang Perangkat Daerah).

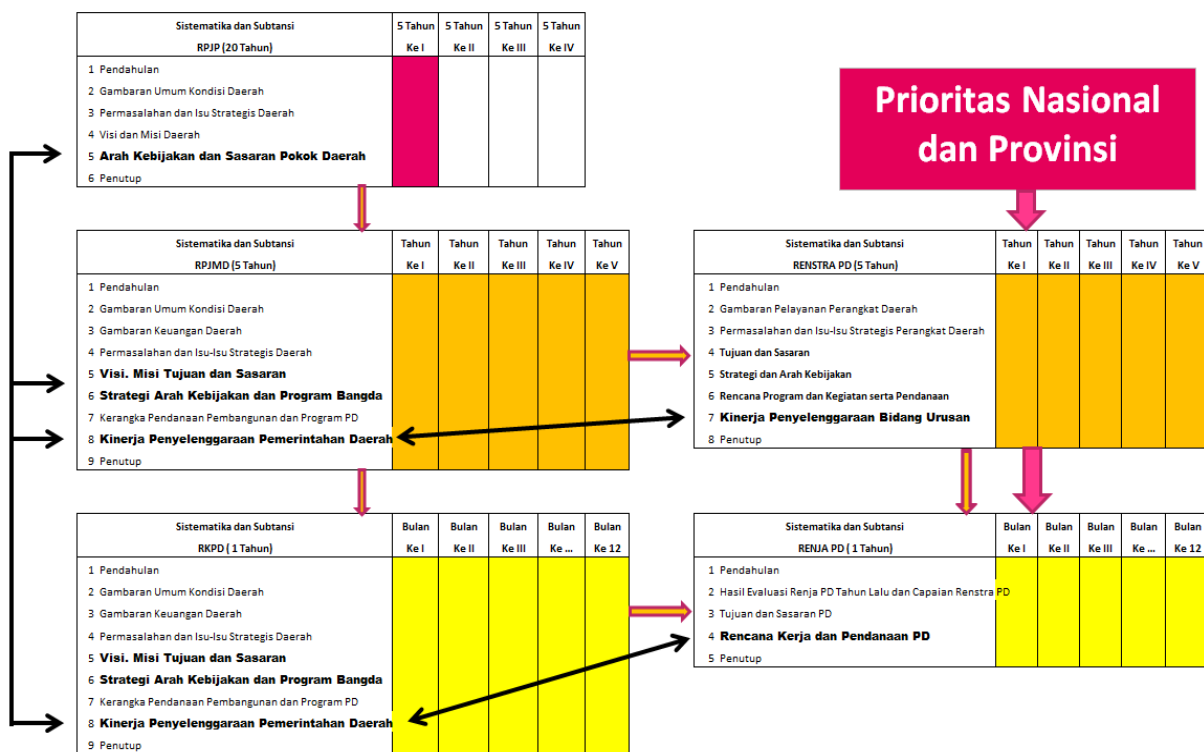
Pemerintah Daerah Kota Bekasi menyikapi peraturan di atas dengan menyusun dasar regulasi perangkat daerah yang ada di Kota Bekasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan regulasi yang berisi khusus tentang perangkat daerah pengelola pendapatan daerah yakni Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selaku Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sebagaimana tahapan perencanaan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Perencanaan di tingkat daerah adalah dokumen rencana strategis dan dokumen rencana kerja perangkat daerah. Rencana

strategis perangkat daerah adalah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD. Yang diselaraskan dengan sasaran pencapaian pembangunan nasional

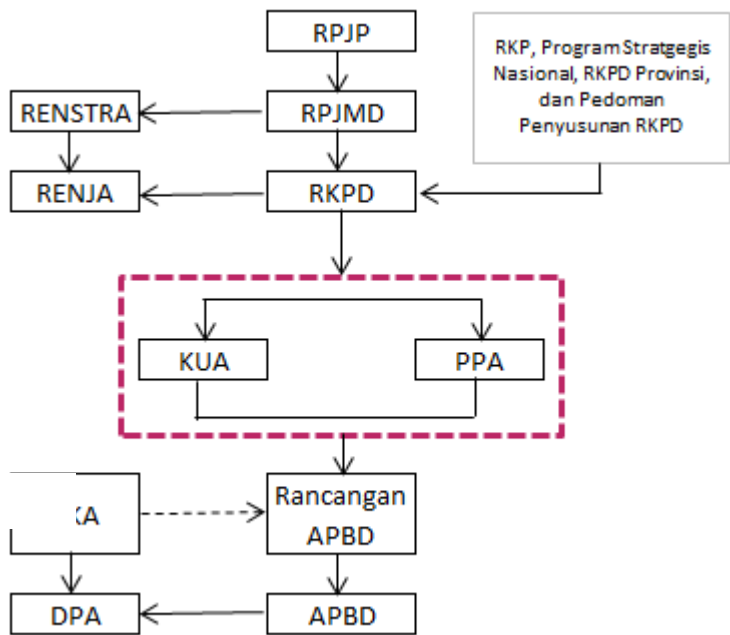
Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan PD



Rencana Kerja atau Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah disusun berdasarkan kewenangan urusan penunjang pemerintahan pada bidang urusan keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana berisi tentang program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan daerah yang kemudian di cocokan dengan urusan yang menjadi kewenangan pada Bapenda Kota Bekasi untuk memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2022 dan rencana pendanaan dan sumber pendanaan

RENJA BAPENDA

Gambar 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi selaku Perangkat daerah yang mempunyai urusan sebagai urusan Penunjang Pemerintahan dengan Bidang Urusannya adalah Keuanganm khususnya tentang pendapatan daerah

tentu menjadi sangat penting guna memastikan ketersediaan anggaran untuk menunjang pembangunan daerah,

Pada tahun 2022 Bapenda Kota Bekasi melaksanakan program dan kegiatan sebagai perangkat daerah yang menjalani urusan penunjang pemerintahan dan sub bidang urusan adalah keuangan yang didukung dengan 2 (dua) Program dan 8 (delapan) Kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan untuk mendukung tema pembangunan pada tahun 2022 yakni **Penguatan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif** dalam rangka mewujudkan visi “**Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**” dan misi Pemerintah Kota Bekasi khususnya misi ke 1 (satu) yakni **meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik** maupun Sasaran yang ada pada Renstra Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yakni Indikator kinerja utama Bapenda Kota Bekasi adalah **Meningkatnya Penerimaan PAD, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Meningkatkan Nilai AKIP Pada Bapenda Kota Bekasi** dengan indikatornya adalah **persentase Peningkatan PAD, Nilai IKM dan Nilai Akip Pada Bapenda Kota Bekasi**.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016, Seri D).
17. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah untuk mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2022 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022.

RENJA BAPENDA

Rencana Kerja ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bapenda pada tahun anggaran 2022. Mekanisme proses pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan di lingkungan Bapenda Kota Bekasi melalui Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumberdaya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Bapenda dan Pemerintah Kota Bekasi.

1.3.2. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.
- 2) Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan tahunan.
- 3) Merumuskan kerangka logis program dan kegiatan yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur agar dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
- 4) Merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dapat mensinergikan sumberdaya atau potensi yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
- 5) Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi.
- 6) Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keseluruhan elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD.

1.2. Dasar Hukum

RENJA BAPENDA

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Renja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bapenda Kota Bekasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bapenda Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan Capaian Renstra Bapenda

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Kota Bekasi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Bekasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN BAPENDA KOTA BEKASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Bapenda

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA KOTA BEKASI

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun N – 2 / 2020

2.1.1.Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2.1

Realisasi Capaian RPJM/Renstra

Tahun 2020

NO	SASARAN RPJM/RENSTRA	PROGRAM	TARGET RPJM/ RENSTRA	REALISASI	KETERANGAN
1.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.67	-16.34	Berdasarkan angka realisasi penerimaan Pendapatan Daerah
2	Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	77.25	77.68	Penilaian berdasarkan hasil survey

Tabel 2.2

Realisasi Pagu Anggaran Program/Kegiatan

Tahun 2020

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11	3.789.090.000	3.251.402.200
J U M L A H		11	3.789.090.000	3.251.402.200

2.1.1.1. Pelaksanaan intensifikasi Tahun 2020 melalui 11 Kegiatan, yang sebelumnya terdiri dari 33 kegiatan berikut Kegiatan yang bersumber dari dana DID namun mengalami refocusing anggaran menjadi 11 kegiatan. yaitu :

1) Pendistribusian SPPT PBB untuk Percepatan Penerimaan PAD;

RENJA BAPENDA

- 2) Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah
- 4) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda
- 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
- 6) Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 7) Evaluasi, Monitoring, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah
- 8) Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
- 9) Pengembangan Aplikasi Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
- 10) Interkoneksi Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
- 11) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan Daerah

RENJA BAPENDA

Tabel 2.3 (T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Bapenda Kota Bekasi s/d Tahun 2020**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	TIndikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda Kota Bekasi)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n -2//2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja tahun n - 2/ 2020	Realisasi Renja n - 2/ 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+8+10)	12=(11/5)
	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah										
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	4.4%	1.97%	1%	0,80%	80%	1%	4.04%	91.82%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan didistribusikan	SPPT	3.437.517	1.326.167	700.000	678.650	96.95%	700.000	2.026.167	58.94%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sartana dan Prasarna pendukung	Unit	160	40	20	8	40%	20	60	32.50%

RENJA BAPENDA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	TIndikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda Kota Bekasi)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n -2//2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja tahun n - 2/ 2020	Realisasi Renja n - 2/ 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+8+10)	12=(11/5)
	Pendukung Pendapatan Daerah	pengelolaan pendapatan Daerah									
		Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	50.9%	45.02%	55.29%	45.02	81.43%	48.67%	48.67	95.62%
	Pengembangan Aplikasi Database Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi data base potensi pajak dan retribusi daerah	Aplikasi	1	-	1	1	100%	-	1	100%
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	97.7%	90,60%	91%	97.17%	106.78%	92%	97,17	99.46%
	Evaluasi, Monitoring, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil sangsi/Monitoring dan Evaluasi Penerimaan	Laporan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

RENJA BAPENDA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	TIndikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda Kota Bekasi)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n -2//2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja tahun n - 2/ 2020	Realisasi Renja n - 2/ 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+8+10)	12=(11/5)
		Retribusi Daerah/									
	Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Penyusunan Selayang Pandang OPD	Jenis	2	-	2	2	100%	-	2	100%
		Nilai IKM	Nilai	79.25	77.97	77	77.97	100.56%	77,25	77,97	98.38%
	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah	Jumlah sistem aplikasi simpatda	Aplikasi	2	2	2	2	100%	2	2	100%
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda	Jumlah aplikasi BPHTB yang terbarukan, aplikasi Website, dan	sistem	2	2	2	2	100%	2	2	100%

RENJA BAPENDA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	TIndikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bapenda Kota Bekasi)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n -2//2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja tahun n - 2/ 2020	Realisasi Renja n - 2/ 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+8+10)	12=(11/5)
		berfungsinya aplikasi PBB dan POS PBB									
	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Penilaian Survey IKM	Kali	2	2	2	2	2	2	2	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Layanan WhatsApp Blast/Broadcast	WA	3500	3500	3500	3500	100%	3500	3500	100%
	Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penerimaan pendapatan daerah	dokumen	4	4	4	4	100%	4	4	100%

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target

Tabel 2.4

Rekapitulasi Serapan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2020

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan
Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.789.090.000	3.251.402.200	85,81%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendapatan Daerah	850.000.000	752.824.500	88.57
Pendistribusian SPPT PBB untuk Percepatan Penerimaan PAD	678.740.000	658.067.000	96.95
Penyediaan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	200.000.000	194.595.000	97.30
Pengembangan database potensi pajak dan retribusi daerah (DID)	300.000.000	290.838.300	96.95
Evaluasi, Monitoring, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	500.000.000	327.400.000	65.48
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	105.000.000	105.000.000	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	175.350.000	170.625.000	97.31
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah	300.000.000	212.989.400	71

RENJA BAPENDA

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Bapenda	300.000.000	231.448.000	77.15
Penyusunan Pelaporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	80.000.000	58.800.000	73.50
Interkoneksi Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	300.000.000	248.815.000	82.54

Terlihat pada tabel di atas ada 2.4 kegiatan yang capaiannya yang mencapai 100% hanya 1 kegiatan, capaian kegiatan 90% ke atas sebanyak 4 kegiatan, capaian kegiatan 80% ke atas sebanyak 2 kegiatan, capaian kegiatan 70% ke atas sebanyak 3 kegiatan dan capaian kegiatan di atas 60% sebanyak 1 kegiatan. Kinerja pada Bapenda Kota Bekasi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh personil sebanyak 210 Aparatur Sipil Negara dan 186 Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020 dengan realisasi serapan anggaran sebesar 85.81 %. Dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kemendagri, Kemenkeu, Kantor Pajak, Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Unsur Muspida Kota Bekasi dan Instansi terkait di Kota Bekasi. Kriteria kegiatan capaian serapan 60% sampai dengan 90% sebanyak 6 kegiatan hal ini dikarenakan adanya efisiensi hasil dari proses pengadaan barang dan jasa, pada kegiatan SIMPATDA untuk pembayaran internet disesuaikan dengan pemakaian dan untuk kegiatan evaluasi monitoring tidak diserapnya belanja perjalanan dinas dalam daerah hal ini terkendala dengan terjadinya pandemi covid.

2.1.3. Keberhasilan Realisasi Program dan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi dapat terlihat pada penerimaan pendapatan daerah yang

menjadi tolah ukur indikator target yang harus dicapai pada tiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Realisasi PAD Terhadap Target Kinerja Ke I Dokumen Perencanaan (RPJMD dan Renstra Tahun 2018 - 2023)

URAIAN	KONDISI AWAL 2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLA H
TARGET PAD RPJMD	2,001,150,459,494.21	3.346.023.558.779	2.168.161.233.072	2.535.157.435.813	2.788.644.102.710	3.067.650.329.500	13.905.636.659.874
REALISASI PAD		2.442.151.873.747	2.044.486.133.856	-	-	-	4.486.638.007.603
PERSENTASE TARGET		21.53%	11,67%	16.91%	10,00%	10,01%	
PERSENTASE REALISASI		22,61%	-16,34%				

Melihat tabel di atas pencapaiannya tidak memenuhi target hal ini dikarenakan adanya kejadian khusus yakni pandemic coovid-19 yang menyebabkan banyaknya sector usaha yang tutup.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Terpenuhi Atau Melebihi Target Kinerja

2.1.4.1. Permasalahan Capaian Strategis Pertama

- 1) Tingginya target PAD yang harus dicapai.
- 2) Adanya kebijakan Pembantasan Sosial Bersekala Besar sehingga menyebabkan banyaknya sector usaha yang tutup

- 3) Kebijakan keuangan pusat difokuskan kepada penanganan Pandemic covid-19
- 4) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - a. Anggaran yang kurang memadai;
 - b. Peningkatan Data Potensi terkandala dengan masih adanya data WP PBB yang belum terhapus dikarenakan masih dalam proses penghapusan piutang PBB;
 - c. Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak memenuhi target dikarenakan tingginya target PAD;
 - d. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak bisa dilakukan terhadap seluruh WP dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran.
 - e. Peningkatan Pajak Parkir terkendala terhadap tingginya target yang ingin dicapai hal ini dikarenakan banyaknya titik parkir yang telah ditetapkan targetnya di gedung-gedung sampai dengan sekarang masih belum aktif pengelolaan gedung tersebut.
 - f. Terjadinya Refocusing anggaran.

2.1.4.2. Upaya dan Rekomendasi

1) Upaya

- Penetapan target pendapatan daerah disesuaikan dengan potensi yang ada;
- Meningkatkan fungsi koordinasi khususnya dengan Disporbudpar agar terjadi sinergitas guna peningkatan ocovasi hunian hotel;
- Melaksanakan kebijakan relaksasi pajak daerah

2.1.5. Implikasi Capaian Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah guna peningkatan kualitas pembangunan di Kota Bekasi. Dikarenakan

sangat strategisnya peran dari pengelolaan pendapatan daerah maka Bapenda Kota Bekasi dalam mengelola pendapatan daerah memperhatikan tupoksi dan proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan seperti yang telah diterangkan di atas tentang pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi

2.1.6. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Dalam Mengatasi Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja.

- 1) Meningkatkan fungsi pendataan dan mengupgrade data WP sesuai kondisi saat ini;
- 2) Melaksanakan intervensi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- 3) Menyusun kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan, checker dan on the spot;
- 5) Melakukan penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
- 6) Membentuk Tim Sinergitas dengan OPD terkait guna Peningkatan Pendapatan Daerah;
- 7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib pajak/wajib retribusi daerah;
- 8) Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan mendekatkan pelayanan di kecamatan-kecamatan dan Mall Pelayanan Publik (Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame dan Retribusi) dan menambah tempat pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Melaksanakan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak PBB-P2;
- 10) Melaksanakan kegiatan on day service dalam rangka percepatan proses perizinan dan pembayaran;
- 11) Melakukan review/penyempurnaan regulasi dan SOP pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
- 12) Melaksanakan pendataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
- 13) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan evaluasi penerimaan PAD secara berjenjang dan berkala.



RENJA BAPENDA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja kunci pada Bapenda Kota Bekasi adalah Persentase peningkatan PAD dan pada tahun 2020 capaian peningkatan PAD adalah sebagai berikut

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi PAD Dengan Tahun Lalu

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PAJAK DAERAH	1,777,112,851,506	1,558,385,667,948	(218,727,183,558)	-12.31%
Pajak Hotel	33,214,013,598	24,405,729,520	(8,808,284,078)	-26.52%
Pajak Restoran	329,609,762,839	227,434,213,890	(102,175,548,949)	-31.00%
Pajak Hiburan	52,546,600,979	24,232,677,384	(28,313,923,595)	-53.88%
Pajak Reklame	48,621,109,098	62,826,268,284	14,205,159,186	29.22%
Pajak Penerangan Jalan	311,795,043,395	352,436,804,465	40,641,761,070	13.03%
Pajak Parkir	44,538,555,872	28,494,034,548	(16,044,521,324)	-36.02%
Pajak Air Tanah	7,504,472,450	5,273,474,560	(2,230,997,890)	-29.73%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	481,729,062,142	435,999,742,361	(45,729,319,781)	-9.49%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	467,554,231,133	397,282,722,936	(70,271,508,197)	-15.03%
RETRIBUSI DAERAH	119,847,414,991	75,832,587,342	(44,014,827,649)	-36.73%
Retribusi Jasa Umum	36,560,570,746	35,335,648,214	(1,224,922,532)	-3.35%
Retribusi JasaUsaha	8,720,364,671	6,641,730,670	(2,078,634,001)	-23.84%
Retribusi Perizinan Tertentu	74,566,479,574	33,855,208,458	(40,711,271,116)	-54.60%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,073,862,434	11,949,321,848	(124,540,586)	-1.03%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot	1,157,092,684	1,400,072,612	242,979,928	21.00%
Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab & Kota Bekasi	3,000,000,000	1,857,176,335	(1,142,823,665)	-38.09%



RENJA BAPENDA

PENDAPATAN ASLI DAERAH	REALISASI 2019	REALISASI 2020	BERTAMBAH/BERKURANG	%
Bagian Laba dariBPR Syariah	2,329,893,583	2,816,478,972	486,585,389	20.88%
Bagian Laba dari PT Bank BJB	5,586,876,167	5,875,593,929	288,717,762	5.17%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	542,058,630,766	404,768,021,159	(137,290,609,607)	-25.33%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1,439,329,550	4,402,576,889	2,963,247,339	205.88%
Penerimaan Jasa Giro	1,541,823,441	6,840,620,912	5,298,797,471	343.67%
Pendapatan Bunga Deposito	29,489,967,082	39,954,923,522	10,464,956,440	35.49%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102,114,412	91,948,582	(10,165,830)	-9.96%
Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30,735,856	134,807,210	104,071,354	338.60%
Pendapatan Denda Pajak	8,495,931,825	2,759,903,956	(5,736,027,869)	-67.51%
Pendapatan Denda Retribusi	58,113,100	121,006,180	62,893,080	108.23%
Pendapatan dari Pengembalian	15,302,282,036	11,737,196,721	(3,565,085,315)	-23.30%
Pendapatan BLUD	387,493,974,845	318,405,360,302	(69,088,614,543)	-17.83%
Lain - Lain PAD Yang Sah Lainnya	40,908,962,822	20,319,676,885	(20,589,285,937)	-50.33%
JUMLAH	2,451,092,759,697	2,050,935,598,297	(400,157,161,400)	-16.34%

Sumber Data : Hasil Rekonsiliasi Realisasi SIMDA, SIMPATDA dan Sismiop yang dituangkan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Permasalahan dan Rekomendasi

1. PERMASALAHAN CAPAIAN STRATEGIS PERTAMA

- 1) Tingginya target PAD yang harus dicapai.
- 2) Terjadinya Pandemi Covid-19
- 3) Akibat adanya kebijakan pembatasan kunjungan serta pembatasan jam operasional selama wabah Covid-19.
- 4) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - a. Anggaran yang kurang memadai;

- b. Terjadinya Pandemi Covid-19
- c. Peningkatan Data Potensi terkendala dengan masih adanya data WP PBB yang belum terhapus dikarenakan masih dalam proses penghapusan piutang PBB;
- d. Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak memenuhi target dikarenakan tingginya target PAD;
- e. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak bisa dilakukan terhadap seluruh WP dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran.
- f. Peningkatan Pajak Parkir terkendala terhadap tingginya target yang ingin dicapai hal ini dikarenakan banyaknya titik parkir yang telah ditetapkan targetnya di gedung-gedung sampai dengan sekarang masih belum aktif pengelolaan gedung tersebut.

2. UPAYA DAN REKOMENDASI

1) Upaya

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah, Bapenda Kota Bekasi berupaya mengintervensi pajak daerah melalui:

a. Intervensi Pajak Daerah melalui Regulasi

Yakni Inovasi kebijakan Bapenda Kota Bekasi untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan yang menyesuaikan harmonisasi terhadap keadaan masyarakat. Kebijakan menerbitkan insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok pajak, atau sanksinya. Insentif fiskal yang diberikan atas dasar diskresi Kepala Daerah dengan melihat situasi terkini terkait pandemic covid-19 sehingga diharapkan dapat tetap mempertahankan capaian pajak daerah dengan optimal dan dengan tujuan agar pembiayaan pembangunan daerah tetap stabil.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Perwal Kota Bekasi No.33 Tahun 2016 tentang Sistem Online Transaksi Wajib Pajak Daerah.

RENJA BAPENDA

2. Kepwal Nomor : 973.7Kep.298-BAPENDA/V/2020 tentang Tentang Pengurangan Ketetapan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi;
3. Kepwal Nomor : 973.7Kep.299-BAPENDA/V/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Kepada Wajib Pajak Daerah Sebagai Pemberian Insentif Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.

Perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Penyelenggaraan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bekasi Nomor : 77 Tahun 2020 B-08/M.2.17/GS/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020.

b. Intervensi Pajak Daerah melalui verifikasi dan validasi data.

Yakni upaya Bapenda untuk mengetahui transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga dapat menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan, petugas Bapenda melakukan penelitian kantor dengan mengecek harga pasaran di WEB dan kelapangan meneliti kebenaran harga jual.

c. Intervensi Pajak Daerah melalui Penagihan Piutang Pajak Daerah

Bapenda Kota Bekasi melakukan penagihan piutang pajak daerah terhadap mata pajak yang terdapat piutang pajak sebagaimana Surat Tugas Nomor : 800/20.1/Wasdalpenda untuk melaksanakan tugas :

1. Melaksanakan pengolahan data dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
2. Menyusun, merekap serta melaporkan hasil penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah perbulan,

triwulan dan tahunan.

d. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemasangan Alat Transaksi Real Time (Tapping Box)

Bapenda Kota Bekasi melakukan pemasangan alat terhadap wajib pajak, pemasangan alat tapping box terhadap wajib pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak Parkir untuk mengetahui potensi pajak real time di lapangan.

e. Intervensi Pajak Daerah melalui Pemeriksaan Pajak Daerah

Bapenda Kota Bekasi melaksanakan pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh terhadap kewajibannya sebagaimana Surat Perintah Nomor. 973/4810-Bapenda.Wasdalpenda untuk melaksanakan perintah: Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk pengujian kepatuhan dan/atau pengujian tujuan lain pada wajib pajak daerah Kota Bekasi untuk masa pajak bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.

2) Rekomendasi

- Melanjutkan kebijak relaksasi karena dampak dari pandemi covid masingterasa pada pelaku usaha;
- Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Meningkatkan Fungsi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Membuat Inovasi terkait peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
- Mengintegrasikan Sistem Pajak Daerah dengan OPD penghasil

2.2.2. Keberhasilan Program dan Kegiatan

Badan pendapatan daerah pada tahun perencanaan periode 2018 - 2023 mempunyai target kinerja yakni :

1. Persentase Peningkatan PAD;

RENJA BAPENDA

Berikut ini adalah gambaran capaian realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2019– 2020

No.	URAIAN	TA. 2019	TA. 2020
I	PENDAPATAN DAERAH	5,963,932,792,508.89	4,888,475,409,491.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,442,151,873,746.89	2,044,486,133,856.00
1.1.1.	Pajak Daerah	1,778,314,661,578.00	1,557,393,746,939.00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	120,560,321,129.49	75,813,251,762.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	12,173,862,434.00	11,949,321,848.00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	531,103,028,605.40	399,329,813,307.00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,686,699,237,834.00	1,630,792,947,810.00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,680,225,376.00	169,743,592,123.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,277,169,857,000.00	1,147,628,323,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	294,849,155,458.00	313,421,032,687.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,835,081,680,928.00	1,213,196,327,825.00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	192,671,706,540.00	-
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	811,483,111,469.00	714,228,381,299.00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60,780,190,000.00	71,382,704,000.00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	770,146,672,919.00	427,585,242,526.00

Terlihat pada tabel 2.7 di atas bahwasanya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 target yang ingin dicapai mengalami penurunan hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kondisi akibat terjadinya pandemi covid-19.



RENJA BAPENDA

Tabel 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2020

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				TAHU N 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	TAHUN 2021 (n+1)	TAHUN 2022 (n+2)	TAHUN 2023 (n+3)	TAHUN 2019 (n-1)	TAHUN 2020 (n)	TAHUN 2021 (n+1)	TAHUN 2022 (n+2)	TAHUN 2023 (n+3)	
	Persentase Peningkatan PAD		V	21.53%	11,67%	16.91%	10,00%	10,01%	22,61%	-16.34%	16.91%	10,00%	10,01%	Pencapaian target RPJMD tahun 2018 – 2023 mengalami penurunan akibat pandemic covid-19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Bapenda

Adalah hal pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada di Bapenda Kota Bekasi dapat dinventarisir isu-isu penting sebagai berikut :

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola Pendapatan Daerah di Kota Bekasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pembangunan daerah di Kota Bekasi dan meningkatkan daya saing daerah melalui Pendapatan daerah. Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu (tahun berjalan / tahun berkenaan adalah yang menjadi hak daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Pendapatan Asli Daerah utamanya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana perimbangan kenaikannya sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Seiring dengan perubahan kelembagaan dalam melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pendapatan mulai tahun anggaran 2017 otomatis disesuaikan dengan kelembagaan baru sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah adalah berorientasi pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan optimalisasi dan intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta diupayakan tanpa membebani masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah sebagai daya saing daerah guna peningkangkatan pembangunan di Kota Bekasi.

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu diperhatikan dalam penganggaran pendapatan daerah adalah :

1. Sumber Daya Bapenda Kota Bekasi

- a) Pemanfaatan CSR dalam melibatkan peran serta stake holders efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
- b) Peningkatan Kompetensi Aparatur berdasarkan kebutuhan fungsi dalam proses bisnis pengelolaan pendapatan daerah;
- c) Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bapenda.

2. Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah

- a) Kecendrungan penurunan capaian penerimaan PAD dari target yang ditetapkan;
- b) Perkembangan ekonomi di Kota Bekasi masih terus berlanjut dan peningkatan investasi di Kota Bekasi terus meningkat.

3. Analisis Rentra Kementerian Dalam Negeri

- a) kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- b) kemampuan Fiskal dan kinerja keuangan daerah;

RENJA BAPENDA

- c) Penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;
- d) Pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal.

4. Analisis Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Terbatasnya Ketersedian lahan yang menumbuhkan perkembangan ekonomi.

5. Visi dan Misi serta RPJMD Kota Bekasi

- a) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang Smart, Bersih dan Akuntabel;
- b) Optimalisasi sumber pajak daerah;
- c) kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d) kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik;
- e) Meningkatnya proporsi pajak daerah;
- f) Rencana Struktur Ruang Kebijakan struktur ruang dalam Revisi RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- g) Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam Revisi RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031.

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis di atas maka pertimbangan dari analisa dokumen perancangan Renstra K/L, Renstra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi terdapat 2 (dua) poin isu penting yakni :

1. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Pelayanan Publik.

Isu penting tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka dapat ditarik 6 (enam) poin penting isu strategis pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penerimaan PAD;
2. Peningkatan fungsi koordinasi dalam rangka terciptanya sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
3. Pelayanan Prima pajak dan Retribusi Daerah;

4. Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui keahlian khusus dalam penanganan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
6. Terciptanya pengelolaan pajak dan retribusi yang Smart tax dan smart retribution sesuaidengan Kota Bekasi yang Smart City.

2.3.1. Hambatan

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kota Bekasi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang pendapatan meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pelayanan, pelaporan dan sistem, pendapatan daerah serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bapenda Kota Bekasi juga melaksanakan tugas pelayanan langsung ke masyarakat yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan validasi PBB dan BPHTB;
3. Mendistribusikan penyampaian SPPT PBB serta daftar himpunan ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
4. Melaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Keberatan;
5. melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat tentang Pendapatan Daerah;
6. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan Pajak Daerah;
7. Melaksanakan perforasi atas permohonan Perangkat Daerah Penghasil maupun Wajib Pajak Daerah;
8. Melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan wajib pajak daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Kota Bekasi, dalam perjalanannya tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, baik upaya dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun upaya peningkatan kinerja pelayanan. Permasalahan-permasalahan tersebut yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di Bapenda Kota Bekasi diklasifikasi menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Permasalahan internal dalam lingkungan Badan Pendapatan, yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal
2. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).
3. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Proses penagihan pajak dan retribusi daerah belum sampai kepada fungsi penyitaan dan lelang

b. Faktor Eksternal

Permasalahan eksternal dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan; kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah;
2. Lemahnya koordinasi, dieksternal satuan kerja antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah;
3. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan

untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAPENDA KOTA BEKASI

N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Masih Belum Optimal	Tata Kelola dan organisasi masih kurang optimal	Lemahnya koordinasi, dieksternal satuan kerja antar satuan kerja sering membuat terhambatnya terutama mengenai data potensi Pendapatan Asli Daerah
			Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal
		Kompetensi aparatur yang kurang dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Ada beberapa kualifikasi tenaga dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah perlu keahlian khusus dan masih belum tersedia di Badan, antara lain Tenaga Juru Sita, Tenaga Penilai Asset (appraisal) dan ke depan juga dibutuhkan penambahan tenaga Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta Penilaian terhadap Seluruh Jenis Pajak Daerah
		Data Potensi Yang Dinamis	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
			Penilaian Pajak dan Retribusi daerah perlu kemampuan teknis khusus sesuai dengan jenis pajak dan retribusi daerah
		Belum Optimalnya Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah	Proses penagihan pajak dan retribusi daerah belum sampai kepada fungsi penyitaan dan lelang
		Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya terintegrasi	Perbedaan peruntukan dan bahasa sistem dimasing masing OPD

2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- Potensi PAD masih banyak yang belum tergali
- Pengelolaan Data potensi masih belum optimal
- Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah
- Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah
- Pelaksanaan SMART City
- Pandemic covid tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya.

b. Peluang

- Peluang Investasi di Kota Bekasi masih tinggi
- Adanya kebijakan relaksasi pajak daerah
- Sarana dan prasarana perkotaan semakin membaik

c. Catatan Perumusan Program

Program yang dijalani oleh Bapenda Kota Bekasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, adapun indikator program telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan Renstra yang disesuaikan dengan dokumen RPJM. Dalam dokumen perencanaan tersebut disepakati capaian yang ingin dicapai pada Bapenda Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun adalah meningkatnya PAD tiap tahunnya.

Pelaksanaan program yang perlu diperhatikan dalam penganggaran adalah:

- ✓ Retribusi daerah yang sebelumnya dalam pengelolaannya ada pada perangkat daerah penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi hal ini tentunya perlu penanganan tersendiri dengan meningkatkan peran koordinasi yang intens terhadap organisasi perangkat daerah pengelola retribusi.
- ✓ Melakukan analisis pendataan potensi terhadap retribusi daerah, memetakan permasalahan pengelolaan retribusi daerah, menyusun rencana aksi dan upaya-upaya pengembangan penerimaan dari retribusi daerah
- ✓ Melakukan analisis potensi pendapatan dan upaya-upaya dalam peningkatan potensi tersebut dan meningkatkan pemberian pelayanan yang maksimal serta debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga diharapkan adanya dampak positif yaitu pengurangan jumlah tunggakan pajak dan retribusi, penambahan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi;
- ✓ Penyempurnaan regulasi tentang pengelolaan pendapatan daerah;

- ✓ Meningkatkan peran sosialisasi untuk ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah supaya informasi tentang Pajak dan Retribusi terinformasikan kepada masyarakat (WP/WR); tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- ✓ Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- ✓ Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi;
- ✓ Meningkatkan peran koordinasi baik antar OPD Penghasil maupun ke pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat;
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- ✓ Optmalisasi pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- ✓ Pembangunan sistem pajak online
- ✓ Pengelolaan data base pajak dan retribusi daerah
- ✓ Pengintegrasian sistem antar OPD Penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
- ✓ Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

2.4.1. Perbanding Rancangan Awal Dengan Analisis Kebutuhan

Terjadi perbedaan jumlah program dan juga jumlah anggaran antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan. Pada saat rancangan awal penetapan program berdasarkan pertimbangan penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Menpan.

Dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwasanya untuk pelaksanaan program urusan pengelolaan keuangan hanya terdapat 1 program

RENJA BAPENDA

Berdasarkan kebutuhan tersebut Bapenda berpedoman pada Permendagri 86 dan merumukan indikator program yang berkesesuaian dengan tupoksi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dilingkungan Bapenda Kota Bekasi Tugas pada Bapenda Kota Bekasi meliputi pelaksanaan fungsi proses bisnis dalam pengelolaan pendapatan daerah mulai dari :

- a. Fungsi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Pengolahan data potensi PAD yang akurat sebagai bahan analisa untuk penetapan target PAD
 - Peningkatan fungsi koordinas baik internal maupun eksternal
 - Analisa kebijakan regulasi tentang PAD
- b. Fungsi Administrasi Pendapatan Daerah
 - Pengelolaan Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
 - Penetapan besaran pajak daerah yang harus dibayarkan
 - Pengelolaan Nomor Wajib Pajak
 - Perforasi benda berharga
- c. Fungsi Pelayanan dan Sistem
 - Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat
 - Menyusun laporan pendapatan daerah secara berkala
 - Pengelolaan system pajak dan retribusi daerah
- d. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
 - Pelaksanaan fungsi pengawasan pajak dan retribusi
 - Pelasanaan fungsi pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak daerah yang terindikasi tidak taat aturan
 - Pelaksanaan fungsi penagihan terhadap wajib pajak daerah baik piutang pajak daerah maupun penagihan aktif

2.4.2. Analisis Kebutuhan

Berangkat dari hasil analisis kebutuhan kegiatan dan hasil pembahasan internal di Bapenda Kota Bekasi, kebutuhan akan kegiatan yang ada di Bapenda Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah hal ini pertimbangan dari :

- Rekomendasi BPK RI dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
- Permasalahan yang timbul dalam proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- Mengakomodir Dokumen SPIP
- Mewujudkan peningkatan nilai Sakip pada Bapenda
- Mengakomodir Dokumen Rencana Aksi KPK

2.4.3. Catatan Rumusan Kebutuhan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, arah dan tema pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022 adalah **Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif.**

Kaitan dengan Bapenda Kota Bekasi dalam mendukung arah tema pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi adalah tentunya sumber pendanaan yang tercermin pada penerimaan Pendapatan Daerah khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai kekuatan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan Pendapatan daerah menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan tersebut.

Tabel 2.10

RENCANA AWAL PENDAPATAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022

URAIAN	TA. 2022
PENDAPATAN DAERAH	6,064,434,203,353.25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,788,644,102,710.00
Pajak Daerah	2,114,682,500,000.00
Hasil Retribusi Daerah	134,350,000,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	12,171,200,000.00
Lain-lain PAD Yang Sah	527,440,402,710.00
PENDAPATAN TRANSFER	3,073,484,808,776.25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,639,019,753,700.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,434,465,055,076.25
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202,305,291,867.00

Untuk dapat mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas Bapenda Kota Bekasi menyusun rencana program dan kegiatan agar tercapainya tujuan dari pembangunan yang telah menjadi kewajiban bagi setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk mendukung arah kebijakan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022, adapun program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

RENJA BAPENDA

Tabel 2.11

Review Rancangan Awal Tahun 2022

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN					KEUANGAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja			100%	108.892.140.000	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	108.892.140.000	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	15.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja (LKIP, SAKIP, LKPJ, LPPD dan Renja)	4 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan	4 Laporan	15.000.000	
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS	100%	108.877.140.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	108.877.140.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota	Jumlah Pembayaran Gaji,	210 Orang	108.867.140.000	Penyediaan Gaji	Kota	Jumlah Pembayaran	2940	108.867.140.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	ASN	Bekasi	Tunjangan dan Premi BPJS			dan Tunjangan ASN	Bekasi	Gaji dan Premi BPJS Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	Orang/Bulan 2520 Orang/Bulan		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	14 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan	14 laporan	10.000.000	
	Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%	150.000.000	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	102.000.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100%	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	102.000.000	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Pakaian Olah Raga	433 stel	-					-	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	17 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah pegawai	17 Orang	102.000.000	
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	43.915.025.122	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2.748.087.900	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	3.378.693.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.748.087.900	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Bangunan	985 Unit	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Bekasi	Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Bangunan	1602 Unit	50.000.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer Jumlah Makanan dan Minuman, rapat dan tamu yang disediakan	44 Unit 512 dus 1015 galon 36 Pak 4485 Box	1.149.999.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Bahan Logistik	15891 Unit	1.765.101.500	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Barang Cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjiilidan	104469 Buku 662966 Lembar 50 Unit	1.241.701.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Cetakan Jumlah penggandaan	691 Unit 757038 lembar	332.986.400	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan	7900 Eksemplar	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan	74860 Eksemplar	100.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas	808 HOK	636.993.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas	808 kali	350.000.000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah arsip yang ditata/dikelola	1750 box	200.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	Jumlah arsip yang ditata/dikelola	1750 box	150.000.000	
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2.949.992.250	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	399.992.250	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah	100%	499.992.250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	399.992.250	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Kantor	10 unit	499.992.250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Kantor	1 Paket	399.992.250	
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	40.536.331.822	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	41.453.057.959	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	40.536.331.822	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	41.453.057.959	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	Jumlah dokumen /surat terkirim	750 Surat	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	Jumlah dokumen /surat terkirim	361 Surat	7.000.000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	1 rekening 13 rekening 5 rekening	1.123.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	276 Rekening	1.073.200.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah jasa keamanan Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Kebersihan	228 Orang	39.404.131.822	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah tenaga keamanan Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	24 Orang 84 Orang 2.988 Orang	40.372.857.959	
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2.949.992.250	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2.400.000.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase terpeliharanya aset milik perangkat daerah	100%	2.450.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.400.000.000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	32 Unit 87 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	200.000.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119 Unit	550.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	113 Unit	350.000.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah peralatan gedung kantor	602 unit	450.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah peralatan	490 unit	400.000.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Luas Gedung Kantor	3184 m2/tahun	1.250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Bangunan /Gedung yang terpeliharaan	3184 M2	1.450.000.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.479.999.900	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.485.998.650	
VII	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	4.479.999.900	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	3.485.998.650	
	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah			49,83 %	899.999.900	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah			49,83 %	663.200.100	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
20	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Estimasi Draft PAD Tahun yang akan Datang Jumlah dokumen Estimasi Penerimaan PAD Tahun Berjalan Jumlah peserta FGD Sinergitas OPD Penghasil PAD	1 Dokumen 1 Dokumen 105 Orang	299.999.900	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Estimasi Draft PAD Tahun yang akan Datang Jumlah dokumen Estimasi Penerimaan PAD Tahun Berjalan Jumlah peserta FGD Sinergitas OPD Penghasil PAD	1 Dokumen 1 Dokumen 110 Orang	235.490.000	
21	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bekasi	Jumlah Profil Wajib Pajak Daerah yang sudah tersistem Jumlah Perwal tentang Juklak dan Juknis Retribusi Daerah	1 Profil 8 perwal	300.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bekasi	Jumlah aplikasi sistem manajemen potensi pajak dan retribusi Jumlah Perwal tentang Juklak pajak Daerah	1 Aplikasi 8 perwal	211.310.000	
22	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah media penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah Jumlah Kegiatan Reward Pajak Daerah	1 Media 1 Event	300.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Kegiatan Reward Pajak Daerah Jumlah Media Penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah	1 Event 21 Media	216.400.100	
	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah			0,80%	1.150.000.000	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah			0,80%	1.023.500.000	
23	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Data Objek Pajak Bangunan Standar dan Non Standar Jumlah dokumen Data Objek Pajak Baru	1 dokumen 1 dokumen	200.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen Data Objek Pajak Bangunan Standar dan Non Standar Jumlah dokumen Data Objek Pajak Baru	1 dokumen 1 dokumen	178.000.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
24	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan didistribusikan	700000 SPPT	850.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan didistribusikan	700000 SPPT	756.500.000	
25	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan akurasi data pengeluaran penerimaan benda berharga/barang koasi Jumlah laporan rekonsiliasi ketetapan retribusi persampahan/kebersihan	4 laporan 12 Laporan 140 Orang	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan akurasi data pengeluaran penerimaan benda berharga/barang koasi Jumlah laporan rekonsiliasi ketetapan retribusi persampahan/kebersihan Jumlah peserta sosialisasi sistem retribusi daerah	4 laporan 12 Laporan 150 Orang	89.000.000	
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak			97,69%	203.600.000	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak			97,69%	151.850.000	
26	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah lokasi layanan pembayaran PBB di Wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	47.600.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah lokasi layanan pembayaran PBB di Wilayah Kecamatan	12 Kecamatan	30.950.000	
27	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan terhadap pelaksanaan penindakan kepatuhan WP Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	1 Laporan 50 LHP	156.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah Jumlah laporan terhadap pelaksanaan penindakan kepatuhan WP	50 LHP 1 Laporan	120.900.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Nilai IKM			77,75	2.226.400.000	Nilai IKM			77,75	1.647.448.550	
28	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Dekorasi Ruangan Pelayanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah aplikasi Virtual Asisten konsultasi Pajak Daerah Jumlah Seragam Petugas Pelayanan Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Verifikasi Nilai Perolehan BPHTB	144 m2 15 Unit 1 Aplikasi 36 Stel 1 Dokumen	525.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Aplikasi Chrbot asisten virtual Jumlah dokumen standar pelayanan verifikasi nilai perolehan BPHTB Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 aplikasi 1 dokumen 5 unit	358.700.000	
29	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen hasil survey IKM Jumlah konten layanan Informasi Pajak Daerah Secara Digital Jumlah FGD Sinergitas Pelayanan Pajak Daerah	1 Dokumen 65 Konten 3 Kali	368.505.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah dokumen hasil survey IKM Jumlah FGD Sinergitas Pelayanan Pajak Daerah Jumlah konten layanan informasi pajak daerah secara digital	2 Dokumen 3 Kali 65 Konten	326.741.250	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
30	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan berkala penerimaan pendapatan daerah Jumlah layanan internet Jumlah sistem aplikasi Pajak Daerah yang berjalan dengan baik Jumlah layanan backup database	3 laporan 12 bulan 7 Aplikasi 1 layanan	1.332.895.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bekasi	Jumlah laporan berkala penerimaan pendapatan daerah Jumlah layanan backup database Jumlah layanan internet Jumlah sistem aplikasi Pajak Daerah yang berjalan dengan baik	3 laporan 1 layanan 12 bulan 5 Aplikasi	962.007.300	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1. Proses Usulan Program dan Kegiatan

Proses perencanaan dimulai dari bawah yakni dengan cara menjangking aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang kesemuanya usulan-usulan masyarakat masuk dalam sistem SIPD

Bapenda di internal melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku jabatan struktural untuk merumuskan program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dengan memperhatikan adakah usulan dari masyarakat melalui SIPD untuk di akomodir dalam usulan. Setelah memperhatikan usulan masyarakat melalui SIPD tidak ada satupun usulan tersebut yang berhubungan dengan tupoksi pada Bapenda Kota Bekasi.

2.5.2. Kesesuaian Usulan Dengan Isu-Isu Penting dan Tupoksi

Usulan kegiatan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang sudah terinput dalam sistem E-Planning yang telah diubah menjadi Sistem SIPD tidak ada yang bersentuhan secara langsung dalam tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

RENJA BAPENDA

Tabel 2.12
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Pemerintah Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Badan
Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PADA RENJA BAPENDA KOTA BEKASI

3.1. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Pengelolaan Program dan Kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi menyesuaikan dengan regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2021. Bapenda melakukan mapping program dan kegiatan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan perubahan dalam dokumen Renstra Bapenda Kota Bekasi

3.2. TUJUAN, SASARAN PADA RENJA BAPENDA KOTA BEKASI

Dengan memperhartikan penjelasan Visi dan Misi dan Program Prioritas Pemerintah Kota Bekasi periode 2018-2023, maka latar belakang yang mempengaruhi perumusan tujuan dan sasaran pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut

1. Bapenda Kota Bekasi ada pada posisi mendukung pertama yakni meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Program program prioritas dalam RPJMD Kota Bekasi yang menjadi urusan atau kesesuaian tupoksi dengan Bapenda Kota Bekasi adalah :
 - a. Program Prioritas No 21 yakni, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
 - b. Program Prioritas Nomor 22 yakni, Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT;
3. Permasalahan Pokok Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi
4. Isu-Isu Strategis

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah		Persentase Peningkatan PAD	21,53%	11,67%	16,91%	10%	10,01%
		Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	21,53%	11,67%	16,91%	10%	10,01%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	77	77,25	76	77,75	79,25
2	Meningkatkan Nilai SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi		Nilai Sakip Pada Bapenda Kota Bekasi	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Nilai Sakip pada Bapenda Kota Bekasi	Nilai Sakip Pada Bapenda Kota Bekasi	B	BB	BB	A	A

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan dan sasaran Bapenda Kota Bekasi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada tabel ini tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Bapenda yang didapatkan dari proses mengidentifikasi masalah di unit kerja Bapenda Kota Bekasi.

Terdapat 2 tujuan hal ini hasil dari klasifikasi pelaksanaan implementasi tujuan melalui program dan kegiatan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

- Tujuan 1
:
Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah
- Indikator Tujuan
Persentase Peningkatan PAD
- Sasaran 1
:
Meningkatnya Penerimaan PAD
- Indikator Sasaran
Persentase Peningkatan PAD

Rumusan Perhitungan :

Penerimaan PAD Tahun n – Penerimaan PAD Tahun n-1	X 100	= Persentase Peningkatan PAD
Penerimaan PAD Tahun n-1		

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Rumus Perhitungan:

Untuk mengetahui nilai indeks

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (I \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$X \times 15 = Y$$

Tujuan 2 : Meningkatkan Nilai Sakip Pada Bapenda Kota Bekasi

Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai Sakip Pada Bapenda Kota Bekasi

Rumus Perhitungan:

Skor	Nilai
> 90-100	AA
> 80-90	A
> 70-80	BB
> 60-70	B
> 50-60	CC
> 30-50	C
> 0-30	D

Tujuan dan sasaran rencana kerja pada Bapenda Kota Bekasi di awali oleh penetapan pemetaan masalah pada Bapenda Kota Bekasi yakni :

- Masalah pokok :
 - Pengelolaan PAD belum optimal
 - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda Kota Bekasi belum Optimal
- Masalah :
 - Besarnya GAP database pajak daerah
 - Tingginya piutang pajak daerah
 - Penindakan wajib pajak dan Fiskus belum optimal
 - Pengawasan, pengendalian pajak dan retribusi belum optimal
 - Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah
 - Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih kurang

- g. Bagian laba dari badan usaha milik daerah belum optimal
- h. Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran belum optimal
- 3. Akar Masalah :
 - a. Pengkinian data pajak daerah belum optimal
 - b. Belum terintegrasinya system pengelolaan pajak daerah
 - c. Administrasi pajak daerah belum tertib
 - d. Akurasi database belum optimal
 - e. Verifikasi dan validasi piutang pajak daerah belum maksimal
 - f. Penagihan piutang pajak daerah belum optimal
 - g. Penghapusan piutang pajak daerah belum dilakukan sesuai ketentuan
 - h. Pencatatan piutang yang akuntabel belum maksimal
 - i. Profesionalitas SDM belum memadai
 - j. Kurang nya tenaga fungsional dibidang perpajakan
 - k. Masih tingginya intensitas tatap muka antara wajib pajak dengan aparaturnya
 - l. Pengelolaan pajak dan retribusi online belum optimal
 - m. Rekonsiliasi pajak dan retribusi daerah belum optimal
 - n. Belum optimalnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah
 - o. Belum terintegrasinya data pajak dan retribusi daerah dengan potensi yang mendukungnya
 - p. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi belum dilakukan secara berkala
 - q. Kesadaran wajib pajak masih kurang
 - r. Prosedur pengurusan pajak daerah yang masih berbelit
 - s. Kinerja BUMD belum optimal
 - t. Pengelolaan aset dan anak perusahaan tidak optimal
 - u. Monitoring dan evaluasi belum efektif
 - v. Pemberian reward dan punishment yang belum jelas
 - w. Lemahnya integritas SDM
 - x. Profesionalitas SDM belum memadai

3.2.1. Tujuan

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Bapenda Kota Bekasi termasuk yang mendukung misi Pertama yakni “meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik” dengan tujuannya yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Profesional dan Akuntabel” yang kemudian Bapenda Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan tersebut Bapenda menetapkan tujuannya adalah “Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah”

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran pada Bapenda Kota Bekasi berdasarkan hasil rancangan dokumen perencanaan RPJMD pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2009 – 2023 adalah :

1. Meningkatnya Penerimaan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Nilai SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah

Tabel 3.2.
Strategi dan Kebijakan
Bapenda Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnya Penerimaan PAD	Mengoptimalkan Penerimaan PAD	Penataan database potensi pendapatan daerah secara online dan offline
			Penurunan Nilai Piutang Pajak Daerah
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah
			Up-dating data pendapatan daerah secara berkala
			Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis IT
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan
			Mengoptimalkan penertiban administrasi pendapatan daerah
			Peningkatan Pelayanan Pendapatan Daerah

	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan Prima	Persyaratan
			Sistem, Mekanisme dan Prosedur
			Waktu Penyelesaian
			Biaya/ Tarif
			Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
			Kompetensi Pelaksana
			Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			Sarana dan Prasarana
			Perilaku Pelaksana
Meningkatkan Nilai SAKIP pada Bapenda Kota Bekasi	Meningkatnya Nilai Sakip pada Bapenda Kota Bekasi	Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Dokumen Perencanaan
			Peningkatan Kualitas Pemetaan Kinerja
			Optimalisasi Pengukuran Kinerja
			Mengoptimalkan Data Kinerja
			Memaksimalkan Pelaporan Kinerja

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

3.3.1.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan

Program Dan Kegiatan :

Kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota Terpilih menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan prioritas pada Bapenda Kota Bekasi Tahun 2021. Adapun faktor-faktor bahan pertimbangan tersebut adalah :

3.3.1.1.

Kesesuaian Visi dan Misi Wali Kota Terpilih

Bapenda Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bekasi yang melaksanakan tugas urusan penunjang pemerintahan umum yakni dalam hal urusan pengelola keuangan daerah khususnya tentang pendapatan daerah. Sebagai lembaga yang dasar urusannya adalah pemerintahan umum maka Bapenda Kota Bekasi masuk dalam katagori **misi kesatu** Wali Kota Terpilih yakni **meningkatkan meningkatkan kapasitas tata kelola**

pemerintahan yang baik Kesesuaian Program Prioritas Pembangunan

Program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, didalam peraturan Permendagri tersebut program-program sudah diatur berdasarkan urusannya, Bapenda masuk dalam katagori urusan Penunjang Pemerintahan dengan Bidang Urusannya adalah pengelolaan keuangan. Dalam aturan tersebut hanya mempunyai **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, program inilah satu-satunya program utama yang menjadi milik Bapenda dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk itu dalam mengakomodir program prioritas pembangunan Walikota terpilih Bapenda memasukan kegiatan program prioritas tersebut kedalam program dan kegiatan yang ada pada Bapenda Kota Bekasi, adapun program prioritas pembangunan Wali Kota Terpilih yang masuk dalam katagori tupoksi pada Bapenda adalah:

1. Program nomor 21 yaitu Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
2. Program nomor 22 yaitu Pengembangan layanan publik berbasis IT;

Dari kedua program di atas Bapenda telah mengakomodir pelaksanaannya yakni dalam program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan kegiatannya adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dibawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu program kegiatan pembangunan yang sesuai dengan urusan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022

Program pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bekasi.

Bapenda Kota Bekasi hanya melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan serta 11 Sub Kegiatan pada tahun 2022, sebagaimana tabel di bawah ini :

RENJA BAPENDA

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	IIndikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.485.998.650				3.900.000.000
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.485.998.650				3.900.000.000
		Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah		49,83%	663.200.100			50,99%	800.000.000
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Estimasi Draft PAD Tahun yang akan Datang	Kota Bekasi	1 Dokumen	235.490.000	PAD		1 Dokumen	300.000.000
		Jumlah dokumen Estimasi Penerimaan PAD Tahun Berjalan	Kota Bekasi	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah peserta FGD Sinergitas OPD Penghasil PAD	Kota Bekasi	110 Orang				110 Orang	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi sistem manajemen potensi pajak dan retrbusi	Kota Bekasi	1 Aplikasi	211.310.000	PAD		1 Aplikasi	250.000.000
		Jumlah Perwal tentang	Kota	8 perwal				8 perwal	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
		Juklak pajak Daerah	Bekasi						
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Reward Pajak Daerah	Kota Bekasi	1 Event	216.400.100	PAD		1 Event	250.000.000
		Jumlah Media Penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah	Kota Bekasi	21 Media				21 Media	
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah		0,80%	1.023.500.000			0,80%	1.150.000.000
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen Data Objek Pajak Bangunan Standar dan Non Standar	Kota Bekasi	1 dokumen	178.000.000	PAD		1 dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen Data Objek Pajak Baru	Kota Bekasi	1 dokumen				1 dokumen	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan didistribusikan	Kota Bekasi	700000 SPPT	756.500.000	PAD		700000 SPPT	800.000.000
6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan akurasi data pengeluaran penerimaan benda berharga/barang koasi	Kota Bekasi	4 laporan	89.000.000	PAD		4 laporan	150.000.000
		Jumlah laporan rekonsiliasi ketetapan retribusi persampahan/kebersihan	Kota Bekasi	12 Laporan				12 Laporan	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
		Jumlah peserta sosialisasi sistem retribusi daerah	Kota Bekasi	150 Orang				150 Orang	
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak		97,69%	151.850.000			97,69%	200.000.000
7	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah lokasi layanan pembayaran PBB di Wilayah Kecamatan	Kota Bekasi	12 Kecamatan	30.950.000	PAD		12 Kecamatan	50.000.000
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Kota Bekasi	50 LHP	120.900.000	PAD		50 LHP	150.000.000
		Jumlah laporan terhadap pelaksanaan penindakan kepatuhan WP	Kota Bekasi	1 Laporan				1 Laporan	
		Nilai IKM		77,75	1.647.448.550			77,75	1.750.000.000
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Chrbot asisten virtual	Kota Bekasi	1 aplikasi	358.700.000	PAD		1 aplikasi	400.000.000
		Jumlah dokumen standar pelayanan verifikasi nilai perolehan BPHTB	Kota Bekasi	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kota Bekasi	5 unit				5 unit	
10	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil survey IKM	Kota Bekasi	2 Dokumen	326.741.250	PAD		2 Dokumen	350.000.000
		Jumlah FGD Sinergitas Pelayanan Pajak Daerah	Kota Bekasi	3 Kali				3 Kali	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
		Jumlah konten layanan informasi pajak daerah secara digital	Kota Bekasi	65 Konten				65 Konten	
11	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan berkala penerimaan pendapatan daerah	Kota Bekasi	3 laporan	962.007.300	PAD		3 laporan	1.000.000.000
		Jumlah layanan backup database	Kota Bekasi	1 layanan				1 layanan	
		Jumlah layanan internet	Kota Bekasi	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah sistem aplikasi Pajak Daerah yang berjalan dengan baik	Kota Bekasi	5 Aplikasi				5 Aplikasi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAPENDA KOTA BEKASI

4.1. Belanja Langsung

Rencana kerja pendanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah seperti tabel di dibawah yang melaksanakan program dan kegiatan belanja rutin dan pembangunan yang terdiri dari

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Belanja Langsung Urusan
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Kegiatan Pengelola Pendapatan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - 2) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 6) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 7) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 8) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 9) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

- 10) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- 11) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

RENJA BAPENDA

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN				159.481.276.759				175.494.805.920
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				155.995.278.109				171.594.805.920
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			15.000.000				16.500.000
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		100%	15.000.000			100%	16.500.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan		4 Laporan	15.000.000	PAD		4 Laporan	16.500.000
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	108.877.140.000			100%	119.764.854.000

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah		100%	108.877.140.000			100%	119.764.854.000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Premi BPJS Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN		2940 Orang/Bulan 2520 Orang/Bulan	108.867.140.000	PAD		2940 Orang/Bulan 2520 Orang/Bulan	119.753.854.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan		14 laporan	10.000.000	PAD		14 laporan	11.000.000
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	102.000.000			100%	112.200.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	102.000.000			100%	112.200.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai		17 Orang	102.000.000	PAD		17 Orang	112.200.000
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.748.087.900				3.022.896.690
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.748.087.900			100%	3.022.896.690
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Bangunan		1602 Unit	50.000.000	PAD		1602 Unit	55.000.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik		15891 Unit	1.765.101.500	PAD		15891 Unit	1.941.611.650
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Jumlah penggandaan		691 Unit 757038 lembar	332.986.400	PAD		691 Unit 757038 lembar	366.285.040

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan		74860 Eksemplar	100.000.000	PAD		74860 Eksemplar	110.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas		808 kali	350.000.000	PAD		808 kali	385.000.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata/dikelola		1750 box	150.000.000	PAD		1750 box	165.000.000
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			399.992.250				439.991.475
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	399.992.250			100%	439.991.475
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Mesin Kantor		1 Paket	399.992.250	PAD		1 Paket	439.991.475
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			41.453.057.959				45.598.363.755
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	41.453.057.959			100%	45.598.363.755
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen /surat terkirim		361 Surat	7.000.000	PAD		361 Surat	7.700.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik		276 Rekening	1.073.200.000	PAD		276 Rekening	1.180.520.000

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah Tenaga Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor		24 Orang 84 Orang 2.988 Orang	40.372.857.959	PAD		24 Orang 84 Orang 2.988 Orang	44.410.143.755
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.400.000.000				2.640.000.000
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.400.000.000			100%	2.640.000.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan		6 Unit	200.000.000	PAD		6 Unit	220.000.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		113 Unit	350.000.000	PAD		113 Unit	385.000.000
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan		490 unit	400.000.000	PAD		490 unit	440.000.000
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan /Gedung yang terpeliharaan		3184 M2	1.450.000.000	PAD		3184 M2	1.595.000.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.485.998.650				3.900.000.000

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	IIndikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
VIII	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.485.998.650				3.900.000.000
		Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah		49,83%	663.200.100			50,99%	800.000.000
19	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Estimasi Draft PAD Tahun yang akan Datang	Kota Bekasi	1 Dokumen	235.490.000	PAD		1 Dokumen	300.000.000
		Jumlah dokumen Estimasi Penerimaan PAD Tahun Berjalan	Kota Bekasi	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah peserta FGD Sinergitas OPD Penghasil PAD	Kota Bekasi	110 Orang				110 Orang	
20	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah aplikasi sistem manajemen potensi pajak dan retrbusi	Kota Bekasi	1 Aplikasi	211.310.000	PAD		1 Aplikasi	250.000.000
		Jumlah Perwal tentang Juklak pajak Daerah	Kota Bekasi	8 perwal				8 perwal	
21	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Reward Pajak Daerah	Kota Bekasi	1 Event	216.400.100	PAD		1 Event	250.000.000
		Jumlah Media Penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah	Kota Bekasi	21 Media				21 Media	
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah		0,80%	1.023.500.000		0,80%	1.150.000.000	

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	IIndikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
22	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen Data Objek Pajak Bangunan Standar dan Non Standar	Kota Bekasi	1 dokumen	178.000.000	PAD		1 dokumen	200.000.000
		Jumlah dokumen Data Objek Pajak Baru	Kota Bekasi	1 dokumen				1 dokumen	
23	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang ditetapkan dan didistribusikan	Kota Bekasi	700000 SPPT	756.500.000	PAD		700000 SPPT	800.000.000
24	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan akurasi data pengeluaran penerimaan benda berharga/barang koasi	Kota Bekasi	4 laporan	89.000.000	PAD		4 laporan	150.000.000
		Jumlah laporan rekonsiliasi ketetapan retribusi persampahan/kebersihan	Kota Bekasi	12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah peserta sosialisasi sistem retribusi daerah	Kota Bekasi	150 Orang				150 Orang	
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak		97,69%	151.850.000			97,69%	200.000.000
25	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah lokasi layanan pembayaran PBB di Wilayah Kecamatan	Kota Bekasi	12 Kecamatan	30.950.000	PAD		12 Kecamatan	50.000.000
26	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	Kota Bekasi	50 LHP	120.900.000	PAD		50 LHP	150.000.000
		Jumlah laporan terhadap pelaksanaan penindakan kepatuhan WP	Kota Bekasi	1 Laporan				1 Laporan	
		Nilai IKM		77,75	1.647.448.550			77,75	1.750.000.000

RENJA BAPENDA

No Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	IIndikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Chrbot asisten virtual	Kota Bekasi	1 aplikasi	358.700.000	PAD		1 aplikasi	400.000.000
		Jumlah dokumen standar pelayanan verifikasi nilai perolehan BPHTB	Kota Bekasi	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kota Bekasi	5 unit				5 unit	
28	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil survey IKM	Kota Bekasi	2 Dokumen	326.741.250	PAD		2 Dokumen	350.000.000
		Jumlah FGD Sinergitas Pelayanan Pajak Daerah	Kota Bekasi	3 Kali				3 Kali	
		Jumlah konten layanan informasi pajak daerah secara digital	Kota Bekasi	65 Konten				65 Konten	
29	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan berkala penerimaan pendapatan daerah	Kota Bekasi	3 laporan	962.007.300	PAD		3 laporan	1.000.000.000
		Jumlah layanan backup database	Kota Bekasi	1 layanan				1 layanan	
		Jumlah layanan internet	Kota Bekasi	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah sistem aplikasi Pajak Daerah yang berjalan dengan baik	Kota Bekasi	5 Aplikasi				5 Aplikasi	

4.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi adalah upaya untuk mendukung visi dan misi Wali Kota terpilih, yang di urai dalam penjabaran program dan kegiatan pada Bapenda dalam dokumen perencanaan tahunan buku Rencana Kerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2022.

Upaya pencapaian tersebut diperjelas lagi dalam mengukur pencapaian program melalui indikator program untuk memudahkan dalam mengukur pencapaian berhasil atau tidaknya dalam mendukung visi dan misi Wali Kota terpilih. Indikator program tersebut di klasifikasi berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja pada Bapenda Kota Bekasi yang tertuang dalam Tupoksi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah tentu memerlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu Bapenda Kota Bekasi dalam menyusun program dan kegiatan sangat memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi agar dapat terwujudnya visi dan misi Wali Kota terpilih. Rencana kerja dan pendanaan pagu indikatif tahun anggaran 2022 pada Bapenda Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Program / Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Program Penunjang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		
PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.481.276.759	
	15.000.000	PAD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	DAU + PAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.877.140.000	PAD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108.867.140.000	PAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	PAD



RENJA BAPENDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		
PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA
	102.000.000	PAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.000.000	PAD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.000.000	PAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.748.087.900	PAD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	PAD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.765.101.500	PAD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	332.986.400	PAD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100.000.000	PAD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	PAD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	PAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.992.250	PAD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	399.992.250	PAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.453.057.959	PAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	PAD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.073.200.000	PAD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.372.857.959	PAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.000.000	PAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	PAD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	PAD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000	PAD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.450.000.000	PAD

Tabel 4.3
Program / Kegiatan
Program Pendukung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		
PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.918.372.000	PAD
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.918.372.000	PAD
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	235.490.000	PAD
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	211.310.000	PAD
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	216.400.100	PAD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	178.000.000	PAD
Penetapan Wajib Pajak Daerah	756.500.000	PAD
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	89.000.000	PAD
Penagihan Pajak Daerah	30.950.000	PAD
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	120.900.000	PAD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	358.700.000	PAD
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	326.741.250	PAD
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	962.007.300	PAD

4.2.1 Program dan Kegiatan yang Tidak Sesuai Dengan RKPD

Rumusan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi telah menyesuaikan dengan apa yang telah di rumuskan pada dokumen RKPD Pemerintah Kota Bekasi. Oleh karena itu tidak ada rumusan program dan kegiatan pada Bapenda Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan RKPD

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja di tahun anggaran 2022 yang didukung oleh 2 program, 8 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan nilai total pagu indikatif sebesar Rp. 159.481.276.759,- anggaran ini termasuk belanja pegawai seperti gaji dan insentif ASN dan Non ASN dengan besaran pagu tersebut Bapenda Kota Bekasi akan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah guna tersedianya dana untuk pembangunan daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan hal di atas, dalam pelaksanaan rencana kerja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah strategis dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, memerlukan sinergi dengan perencanaan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program kerja tahunan yang sesuai dengan program kerja tahunan Pemerintah Kota Bekasi
3. Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2022 tahapan perencanaan telah di laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku adalah mengikat bagi unit kerja di lingkungan Bapenda Kota Bekasi.

Untuk rencana tindaklanjut kedepan Badan Kota Bekasi masih memprioritaskan kegiatan :

1. Pelaksanaan pengelolaan PBB,
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi
3. Peningkatan administrasi pengelolaan pendapatan daerah
4. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan
5. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Bapenda Kota Bekasi

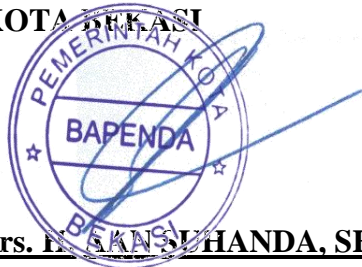
RENJA BAPENDA

Demikian dokumen perencanaan tahunan ini dibuat atas persetujuan dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan apabila dipandang perlu untuk perubahan dan/atau perbaikan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

Bekasi,

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI**



Drs. E. SAKSI HANDA, SH, M.SI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620112 198603 1 019